



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

SEKRETARIAT DITJEN PSDKP

Laporan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan dan capaian kinerja di
Triwulan I Tahun Anggaran 2025

KATA PENGANTAR

Kinerja organisasi wajib dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas fungsi yang dilaksanakan dan dituangkan dalam **Laporan Kinerja (Lkj)**. Hal tersebut sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lkj Sekretariat Ditjen. PSDKP triwulan I Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Sekretariat Ditjen. PSDKP selama tahun anggaran berjalan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Pada triwulan I tahun 2025 atas kinerja yang telah ditorehkan dengan dinamika kebijakan pemerintah di awal tahun anggaran 2025, Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP sebesar **108,85%**. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh pimpinan dan pegawai Sekretariat Ditjen PSDKP. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sinergi dan kerjasamanya, semoga di periode selanjutnya tetap dapat mempertahankan sinergi dan kerjasama yang lebih baik.

Jakarta, April 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Suharta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tertanggal 24 Januari 2025. Penyusunan LKj Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025 merupakan kewajiban dan upaya memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan pada kurun waktu bersangkutan. Nilai kinerja organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025 atas 33 indikator kinerja sebesar **108,85%** dengan rincian berikut:

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP (nilai)	71,5	-	-	
ISK1.1.2	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai anggaran (%)	100%	-	-	
ISK1.1.3	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP (nilai)	92	-	-	
ISK1.1.4	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai IKPA (%)	100%	-	-	
ISK1.1.5	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP (nilai)	77	-	-	
ISK1.1.6	Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	95%	-	-	
ISK1.1.7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81	-	-	
ISK1.1.8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88	-	-	
ISK1.1.9	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35	-	-	
ISK1.1.10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100%
ISK1.1.11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	85%	85%	100%	117,65 %
ISK1.1.12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95%	100%	105,26 %
ISK1.1.13	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5	-	-	
ISK1.1.14	Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP	88,5	80	92,24	115,30 %
ISK1.1.15	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5	-	-	

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.16	Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100%
ISK1.1.17	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	-	-	
ISK1.1.18	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	-	-	
ISK1.1.19	Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100%	-	-	
ISK1.1.20	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	16	-	-	
ISK1.1.21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.22	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.23	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78	-	-	
ISK1.1.24	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP	83	-	-	
ISK1.1.25	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	1	-	-	
ISK1.1.26	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	100%	-	-	
ISK1.1.27	Nilai implementasi program budaya kerja	70	-	-	
ISK1.1.28	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	60	-	-	
ISK1.1.29	Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.30	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76%	76%	99,93 %	120%
Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Efektif					
ISK1.2.1	Persentase implementasi kerja sama luar negeri	80%	-	-	
ISK1.2.2	Persentase dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani	80%	-	-	

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.2.3	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	-	-	

Dari 33 indikator sasaran kegiatan yang ditargetkan pada tahun 2025, sebanyak enam indikator sasaran kegiatan yang dihitung capaiannya pada triwulan I tahun 2025. Seluruh indikator yang dihitung capaiannya pada triwulan I telah berhasil mencapai target ditetapkan dengan tiga indikator kategori istimewa dengan persentase capaian kinerja diatas 110% atar target ditetapkan.

Meskipun terdapat dinamika dalam kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP dengan program dukungan manajemen internal lingkup Ditjen PSDKP dapat dilaksanakan dengan baik, rencana penarikan dana sudah linier dengan realisasi anggaran setiap bulan. Secara umum tidak terdapat kendala pada kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025.

DAFTAR ISI

I KATA PENGANTAR

II RINGKASAN EKSEKUTIF

III BAB I PENDAHULUAN

VI BAB II PERENCANAAN KINERJA

V BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

VI BAB IV PENUTUP

VII LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna mendukung implementasi ekonomi biru di Indonesia. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen PSDKP bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya laut serta menegakkan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan ekosistem perairan nasional.

Dalam mendukung tugas utama Ditjen PSDKP, Sekretariat Ditjen PSDKP memiliki fungsi yang sangat krusial, terutama dalam aspek perencanaan, administrasi, keuangan, koordinasi, serta pengelolaan sumber daya manusia dan logistik. Sekretariat berperan dalam memastikan efektivitas operasional serta optimalisasi anggaran guna mendukung berbagai program dan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan, seperti pemberantasan illegal fishing, penguatan pengawasan wilayah perairan, serta pengembangan teknologi pemantauan perikanan.

Pelaksanaan ekonomi biru sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan menuntut pengawasan yang lebih ketat serta sistem administrasi yang efisien dan responsif. Oleh karena itu, laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, serta efektivitas kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP dalam mengawal implementasi ekonomi biru.

Laporan ini akan mengevaluasi berbagai aspek kinerja, termasuk efektivitas tata kelola organisasi, efisiensi pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dalam sistem administrasi dan pengawasan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan penguatan peran Sekretariat Ditjen PSDKP dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Ditjen. PSDKP

telah menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP triwulan I tahun 2025 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP triwulan I tahun 2025 adalah:

- 1) Sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP kepada seluruh stakeholder.
- 2) Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

C. TUGAS dan FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas Sekretariat Ditjen. PSDKP adalah melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025, Sekretariat Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- e. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- j. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.5522/PSDKP.1/KP.440/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 maka struktur organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP terdiri dari tujuh Tim Kerja sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program
2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
3. Tim Kerja Hukum
4. Tim Kerja Kerjasama
5. Tim Kerja Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat
6. Tim Kerja Keuangan dan Umum
7. Tim Kerja Manajemen Transformasi

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025 secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Ditjen. PSDKP, serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan triwulan I tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen. PSDKP triwulan I tahun 2025 dan jika ada kendala kinerja, merekomendasikan perbaikan kinerja untuk periode berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RANCANGAN AWAL RENSTRA DITJEN PSDKP 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam proses penyusunan rencana strategis KKP tahun 2025-2029, sehingga penyusunan renstra Ditjen PSDKP menunggu pengesahan Renstra KKP.

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 belum ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut akan membahas tentang perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025 Sekretariat Ditjen PSDKP telah menyepakati dua Sasaran Kegiatan dan 33 indikator sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2025

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
Sasaran Kegiatan 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP			
1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	71,5
2	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai anggaran (%)	%	100
3	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	92
4	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai IKPA (%)	%	100
5	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	77
6	Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	%	95
7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	Indeks	81
8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai	88
9	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	Nilai	3,35

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	%	100
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	%	85
12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	95
13	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	Nilai	<0,5
14	Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP	Nilai	88,5
15	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	88,5
16	Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	%	100
17	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	100
18	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
19	Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	%	100
20	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Unit	16
21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	80
22	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	Nilai	80
23	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	Nilai	78
24	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP	Nilai	83

Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025
25	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	Unit	1
26	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	%	100
27	Nilai implementasi program budaya kerja	Nilai	70
28	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	Nilai	60
29	Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	Indeks	80
30	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	%	76
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Efektif			
31	Persentase implementasi kerja sama luar negeri	%	80
32	Persentase dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani	%	80
33	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	indeks	80

C. ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DUKUNGAN MANAJEMEN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Sekretariat Ditjen PSDKP. Isu-isu ini menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan serta implementasi kebijakan ekonomi biru. Beberapa permasalahan utama dalam dukungan manajemen antara lain:

1. Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi SDM Pengawasan (Polsus PWP3K, AKP, dan PPNS)
 - a. Jumlah personel pengawasan masih belum mencukupi untuk mengoptimalkan pengawasan di seluruh wilayah perairan Indonesia.
 - b. Keterbatasan dalam kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pemanfaatan teknologi pengawasan serta penerapan regulasi yang kompleks.
2. Belum Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Terkait Pengawasan Garam
 - a. Regulasi terkait pengawasan produksi dan distribusi garam masih belum memiliki Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang jelas.

- b. Ketiadaan NSPK ini menyebabkan adanya ketidaksinkronan dalam kebijakan pengawasan serta lemahnya kontrol terhadap kualitas dan distribusi garam nasional.
 - c. Diperlukan percepatan dalam penyusunan NSPK agar pengawasan garam dapat lebih terstruktur dan efektif.
3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Belum Tertib
- a. Tata kelola aset dan BMN dalam lingkup Ditjen PSDKP masih menghadapi kendala dalam hal pendataan, pemanfaatan, dan pemeliharaan.
 - b. Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki.
 - c. Dibutuhkan upaya perbaikan dalam tata kelola BMN, termasuk digitalisasi sistem pencatatan dan pengawasan terhadap penggunaan aset negara guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi.

Isu-isu ini menjadi perhatian utama dalam peningkatan efektivitas pengawasan dan dukungan manajemen di lingkungan Ditjen PSDKP. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyusunan regulasi yang lebih jelas, serta optimalisasi pengelolaan aset guna mendukung keberhasilan pengawasan kelautan dan perikanan.

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen implementasi SAKIP dilaksanakan dengan klarifikasi data kinerja yang telah dicapai atas target yang telah ditetapkan, pembahasan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, disertai dengan verifikasi dan reuiu data kinerja. Penghitungan kinerja dilaksanakan secara berkala bagi indikator kinerja yang telah ditetapkan target interim. Untuk target yang ditetapkan dalam satu tahun maka penghitungan kinerja dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Untuk unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Ditjen PSDKP dan satker lingkup Ditjen PSDKP serta Dekonsentrasi, hasil penghitungan capaian kinerja diinput kedalam Sistem Aplikasi Pengelolaan kinerja (SAPK) KKP melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Hasil penghitungan capaian kinerja dituangkan ke dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis pembahasan merujuk PermenPAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Sekretariat Ditjen PSDKP telah menetapkan dua Sasaran Kegiatan yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dan Terselenggaranya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dengan 33 indikator sasaran kegiatan. Pada triwulan I tahun 2025 atas kinerja yang telah ditorehkan, Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP sebesar **108,85%**. Secara detil capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Sekretariat Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP (nilai)	71,5	-	-	
ISK1.1.2	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai anggaran (%)	100%	-	-	
ISK1.1.3	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP (nilai)	92	-	-	
ISK1.1.4	Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai IKPA (%)	100%	-	-	
ISK1.1.5	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP (nilai)	77	-	-	
ISK1.1.6	Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	95%	-	-	
ISK1.1.7	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81	-	-	
ISK1.1.8	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88	-	-	
ISK1.1.9	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35	-	-	
ISK1.1.10	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	85%	85%	100%	117,65 %
ISK1.1.12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95%	100%	105,26 %
ISK1.1.13	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5	-	-	
ISK1.1.14	Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP	88,5	80	92,24	115,30 %
ISK1.1.15	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5	-	-	
ISK1.1.16	Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100%	100%	100%	100%
ISK1.1.17	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	-	-	
ISK1.1.18	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	-	-	
ISK1.1.19	Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100%	-	-	
ISK1.1.20	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	16	-	-	
ISK1.1.21	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.22	Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP	80	-	-	

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP					
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PSDKP					
ISK1.1.23	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78	-	-	
ISK1.1.24	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP	83	-	-	
ISK1.1.25	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	1	-	-	
ISK1.1.26	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP	100%	-	-	
ISK1.1.27	Nilai implementasi program budaya kerja	70	-	-	
ISK1.1.28	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	60	-	-	
ISK1.1.29	Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80	-	-	
ISK1.1.30	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76%	76%	99,93 %	120%
Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Efektif					
ISK1.2.1	Persentase implementasi kerja sama luar negeri	80%	-	-	
ISK1.2.2	Persentase dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani	80%	-	-	
ISK1.2.3	Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	-	-	

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP sepanjang triwulan I tahun 2025 dituangkan dalam enam indikator sasaran kinerja yang dihitung capaiannya. Secara lebih detil dijabarkan progres kinerja atas indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP sebagai berikut:

ISK 1.1.1 Nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP

Pengukuran indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang dilakukan atas perencanaan anggaran dilakukan dengan sistem melalui Aplikasi MONEV Kemenkeu berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektifitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Aspek efektifitas sebesar 75 yang terdiri dari Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dengan bobot 30 dan Nilai efektifitas Satker dengan bobot 45. Selanjutnya untuk aspek efisiensi sebesar 25 (penggunakan SBK 10% dan Efisiensi SBK 15%) yang diperoleh dari nilai efisiensi Satker. Target dari indikator NKPA Ditjen PSDKP Tahun 2025 adalah sebesar 81,5 dan dihitung pada akhir tahun anggaran.

Hingga triwulan I Tahun 2025, Capaian NKPA Ditjen PSDKP masih belum dapat dihitung karena masih proses integrasi data capaian volume realisasi output (CVRO) dari Aplikasi SAKTI. Proses penginputan ini masih menunggu dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Awal bulan Februari 2025 telah dilakukan *assesment* rincian output sebanyak 69 output sebagai dasar penghitungan dan pelaporan capaian output sampai akhir tahun 2025.

Adapun kendala yang dijumpai selama Triwulan I Tahun 2025 adalah SDM pelaporan di Satker yang mengalami pergantian dan harus kembali diberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi tentang pelaporan dan penginputan capaian volume realisasi output di Aplikasi SAKTI dan monitoring penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) pada Aplikasi Monev Kemenkeu.

Untuk meningkatkan capaian NKPA Tahun 2025 perlu dilakukan upaya perbaikan sekaligus rencana kegiatan pada periode berikutnya, antara lain :

1. Sosialisasi proses pelaporan dan penginputan capaian volume realisasi output (CVRO) di Aplikasi SAKTI dalam rangka untuk meningkatkan capaian pada aplikasi Monev Kemenkeu.
2. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian ouput dan penggunaan SBK pada aplikasi Monev Kemenkeu terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP.

ISK 1.1.2 Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung nilai kinerja perencanaan anggaran

Untuk triwulan I tahun 2025 masih dilakukan pemantauan nilai kinerja perencanaan anggaran Ditjen PSDKP. Terkait kelengkapan data dukung nilai kinerja perencanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran, rencana penarikan dana, laporan capaian output program dan RKA-K/L dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran lingkup Ditjen PSDKP disajikan setiap pekan pada hari senin untuk memantau kondisi pergerakan anggaran, nlokir, outstanding kontrak dan sisa anggaran
2. Rencana penarikan dana dapat dipantau pada aplikasi OMSPAN Ditjen PSDKP setiap saat dan dilakukan penyesuaian RPD setiap triwulan berdasarkan realisasi anggaran terakhir
3. Laporan capaian output program belum dapat dilaporkan pada triwulan I karena terkait dengan capaian kinerja indikator kinerja Ditjen PSDKP dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran setelah penghitungan kinerja
4. RKA-K/L Ditjen PSDKP dapat diakses pada aplikasi SAKTI Ditjen PSDKP setiap saat

Tidak ada kendala dalam penyiapan kelengkapan data dukung nilai kinerja perencanaan anggaran.

ISK 1.1.3 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat delapan indikator kinerja yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerapan anggaran dan capaian output.

Indikator kinerja ini dihitung capaian kinerjanya pada semester I dan II tahun 2025 namun dapat dipantau progres kinerjanya melalui aplikasi OMSPAN. Tangkap layar hasil pemantauan disajikan pada gambar 3.1

Indikator Pelaksanaan Anggaran														
NO	KODE ES1	NAMA ES1	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.28	92.57	100%	0.00	92.57
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	17.57				
			Nilai Aspek	100.00		100.00				70.28				

Gambar 3.1 tangkap layar pemantauan IKPA Ditjen PSDKP per Maret 2025

1. Untuk revisi DIPA Ditjen PSDKP sepanjang triwulan I tahun 2025 sebanyak tiga kali yaitu untuk efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, untuk RO cadangan yang dialihkan ke SBKK dan untuk relaksasi anggaran buka blokir untuk anggaran listrik perkantoran dan hari operasi kapal pengawas sebanyak 28 hari. Seluruh upaya revisi DIPA telah diselesaikan sebelum triwulan I berakhir.
2. Deviasi halaman III DIPA tidak menjumpai kendala karena revisi diselesaikan tepat waktu
3. Penyerapan anggaran tidak menjumpai kendala karena pada triwulan I tahun 2025 realisasi anggaran sesuai dengan RPD ditetapkan
4. Belanja kontraktual tidak mengalami kendala ...
5. Tagihan yang muncul selama triwulan I sudah dibayarkan tepat waktu
6. Untuk pengelolaan UP dan TUP tidak ada kendala karena seluruh pertanggungjawaban/pembayaran dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Untuk capaian output periode triwulan I tahun 2025 sebesar 70,28 dikarenakan hasil dari pengisian output untuk periode tersebut baru dapat dilihat setelah periode 30 April 2025.

Sebagai upaya perbaikan untuk pelaporan capaian output akan diingatkan kepada Satker lingkup Ditjen PSDKP agar lebih cepat dalam penyampaian laporan capaian output pada aplikasi SAKTI.

ISK 1.1.4 Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung IKPA

Kelengkapan data dukung IKPA terdiri dari RKA-K/L, RPD, data kontrak OMSPAN, rekap penyelesaian dokumen UP dan TUP, Kartu Pengawas UP TUP, realisasi anggaran dan data capaian output. Seluruh kelengkapan data dukung dapat diperoleh dan diakses dengan mudah pada aplikasi SAKTI dan OMSPAN.

ISK 1.1.5 Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik telah diluncurkan oleh Kementerian PAN dan RB pada Maret 2025, dan telah dilakukan sosialisasi ketentuan Kompetisi Lomba ke Seluruh K/L. Direktorat Jenderal PSDKP telah mengikuti Sosialisasi dan telah di sampaikan ke Seluruh Unit Kerja untuk mengikuti Kompetisi Inovasi melalui Surat Nomor : 632/PSDKP.1/OT.730/IV/2025 Tanggal 29 April 2025. Saat ini tengah dilakukan identifikasi inovasi yang memenuhi kriteria dan akan diikutsertakan ke KIPP. Identifikasi awal adalah inovasi terkait Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat. Kendala yang dijumpai dalam identifikasi inovasi adalah pengumpulan bahan dukung untuk KIPP masih belum memadai bahan dukung standar.

ISK 1.1.6 Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan didukung oleh anggaran belanja pegawai, barang dan modal dengan pagu anggaran dan realisasi sebagaimana tercantum pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2025

APBN	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu RM	197.743.333.000	610.777.407.000	18.588.023.000	827.108.763.000
Realisasi	51.472.114.418	41.598.060.076	230.139.490	93.300.313.984
Besaran realisasi	26,03%	6,81%	1,24%	11,28%

Hingga triwulan I tahun 2025 telah terealisasi anggaran sebesar Rp93.300.313.984,00 dari pagu Rp827.108.763.000,00 atau sebesar 11,28%. Jika melihat Rencana Penarikan Dana (RPD) Ditjen PSDKP maka dapat dilihat pada triwulan I tahun 2025 realisasi anggaran Ditjen PSDKP diatas RPD yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dari pagu tersebut terdapat anggaran blokir kode 2 dan efisiensi sebesar Rp314.066.124.000,00 sehingga besaran realisasi atas pagu efektif Ditjen PSDKP sebesar 18,18%.

Untuk mencapai target penyerapan anggaran sebesar 95% pada akhir tahun 2025, maka direkomendasikan untuk mengajukan usulan revisi anggaran buka blokir agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Tabel 3.3 Monitoring Realisasi dan Rencana Penarikan Dana Ditjen PSDKP tahun 2025

Bulan	RPD (Rp)	Realisasi (Rp)	RPD Akumulatif (Rp)	Relisasi Akumulatif (Rp)
Januari	13.325.488.654	8.940.267.985	13.325.488.654	8.940.267.985
Februari	29.887.625.416	31.423.542.264	43.213.114.070	40.363.810.249
Maret	45.184.019.553	52.936.503.735	88.397.133.623	93.300.313.984
April	33.690.412.088	24.265.201.600	122.087.545.711	117.565.515.584
Mei	46.975.456.295	0	169.063.002.006	-
Juni	63.675.609.947	0	232.738.611.953	-
Juli	60.643.715.584	0	293.382.327.537	-
Agustus	56.611.813.303	0	349.994.140.840	-
September	59.215.823.327	0	409.209.964.167	-
Oktober	76.209.805.296	0	485.419.769.463	-
November	93.327.973.182	0	578.747.742.645	-
Desember	248.361.020.355	0	827.108.763.000	-

Lebih lanjut, terkait RPD yang telah disusun dapat dilakukan penyesuaian sehingga deviasi RPD dan realisasi anggaran Ditjen PSDKP tidak terlalu jauh, yang dapat mempengaruhi sub indikator deviasi halaman III DIPA pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

ISK 1.1.7 Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP

Indeks Profesionalitas ASN mendeskripsikan kualitas anggota profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang berkerja pada instansi pemerintah. Indikator ini dihitung capaian kerjanya pada semester I dan II tahun anggaran 2025 dan dapat dipantau capaian kerjanya pada laman <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn#/ip-asn/eselon>. Untuk triwulan I belum dapat dipantau progres kinerja IP ASN Ditjen PSDKP.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang upaya peningkatan kompetensi pegawai diantaranya sebagai berikut:

1. Ngobras (Ngobrol Cerdas Bareng Setditjen PSDKP) yang menghadirkan obrolan santai dan diskusi secara daring seputar kesekretariatan selama 3 jam. Pada triwulan I tahun 2025 sudah terdapat dua edisi Ngobras dengan tema yaitu:
 - a. Pengembangan Kompetensi ASN dan Uji Kompetensi
 - b. Anggaran bicara: perencanaan matang, eksekusi tepat untuk kinerja pengawasan SDKP yang hebat

2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Manajerial dan Jabatan Non Manajerial lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 pejabat administrator setara eselon III (Kepala UPT Pangkalan: Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Benoa, dan Pangkalan PSDKP Tual)
 - b. 7 Pejabat Pengawas setara eselon IV (Kepala UPT Stasiun: Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Pontianak, Stasiun PSDKP Tarakan, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Ambon, dan Kepala Subbagian Umum Pangkalan PSDKP Batam)
 - c. 5 Pejabat Pelaksana setara eselon V (Kepala Urusan Umum: Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Pontianak, dan Stasiun PSDKP Tahuna)
 - d. 1 Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Muda (Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan).
3. Pelantikan Jabatan Fungsional lingkup Ditjen PSDKP untuk Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

Selain upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai juga dilakukan monitoring presensi pegawai sebagai upaya memantau tingkat kedisiplinan pegawai.

ISK 1.1.8 Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal sebagai SAKIP, tahun 2025 kembali menjadi salah satu indikator pada unit kerja Sekretariat Ditjen PSDKP dengan target Penilaian Mandiri SAKIP sebesar 88. Indikator yang dihitung pada triwulan III tahun 2025 ini sudah diimplementasikan di lingkungan Sekretariat Ditjen PSDKP sepanjang triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 di unit kerja lingkup Ditjen PSDKP
2. Rekonsiliasi penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 lingkup Ditjen PSDKP
3. Pendampingan revisi anggaran sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 untuk efisiensi anggaran
4. Penyusunan Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029
5. Fasilitasi revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 untuk pergantian Kelapa Unit Kerja di UPT PSDKP
6. Penghitungan kinerja tahun 2024 beserta verifikasi kinerja

ISK 1.1.9 Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP

Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah merupakan indikator yang dihitung capaian kerjanya pada akhir tahun anggaran dengan implementasi di sepanjang tahun anggaran. Upaya yang telah dilakukan sebagai wujud implementasi nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP sepanjang Triwulan I TA 2024 adalah menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 811/SJ.2/HP.420/III/2025, 10 Maret 2025 Hal Rencana Aksi Tindak Lanjut Area of Improvement Hasil Evaluasi BPKP atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, dari hasil evaluasi tersebut, terdapat 3 (tiga) hal yang harus ditindaklanjuti oleh Satgas SPIP Unit Eselon I yaitu:

- a. Melakukan identifikasi dan analisis ulang terhadap risiko setelah selera risiko dan toleransi risiko ditetapkan.
- b. Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait dengan risiko.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap risiko secara berkelanjutan dan didokumentasikan dengan baik.

Dari tiga rekomendasi tersebut, Tim Satgas SPIP DJPSDKP telah menindaklanjuti 2 (dua) rekomendasi yaitu pada point a yaitu identifikasi dan analisis ulang terhadap risiko telah dilakukan pada pelaksanaan penyusunan risiko TA 2025 dan c yaitu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut.

Terhadap hal tersebut, DJPSDKP telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Itjen KKP atas hasil reuview manajemen risiko TA 2025 yang tertuang pada Berita Acara Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor 3594.03.03/ITJ/PL.420/III/2025 tanggal 3 Maret 2025

Sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap maturitas SPIP DJPSDKP, secara berkala Satgas SPIP melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis MR yang juga menjadi salah satu indikator kinerja Setditjen PSDKP dan disampaikan hasilnya kepada seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP pada periode Triwulan I TA 2025 lewat surat dinas Sesditjen PSDKP Nomor B.1477/PSDKP.1/OT.710/IV/2025, 14 April 2025 Hal Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko TW I Tahun 2025 lingkup Ditjen PSDKP, sedangkan untuk point b yaitu

sosialisasi/bimtek SPIP Tahun 2025 belum dilaksanakan dan rencananya akan dilakukan pada periode kinerja interim selanjutnya.

ISK 1.1.10 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Pengendalian kegiatan berbasis risiko telah diimplementasikan oleh Ditjen PSKDP sejak periode Renstra 2020-2024 pada unit kerja dibawahnya dan dilanjutkan pada periode Renstra berikutnya. Sebagai indikator kinerja yang dihitung capaiannya setiap triwulan maka berikut disajikan realisasi kinerja indikator dimaksud pada tabel 3.4

Tabel 3.4 realisasi indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Ditjen PSDKP					Capaian
	Tahun	Target	Realisasi			
TW I			TW II	TW III	TW IV	
2025	85%	100%	-	-	-	100%

Pada periode sebelumnya di tahun 2023 dan 2024, persentase pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko dilaksanakan di unit kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP namun pada tahun 2025 indikator kinerja tersebut di lingkup Ditjen PSDKP sehingga belum dapat disandingkan secara langsung. Namun demikian selama kurun waktu tiga tahun anggaran berturut turut, implementasi pengendalian kegiatan berbasis risiko di seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP telah terealisasi sebesar 100%.

Selama triwulan I tahun 2025, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan rapat rutin dalam rangka pemantauan realisasi kegiatan pengendalian
2. Melakukan adendum atas kegiatan yang tidak dilaksanakan karena efisiensi atau perubahan organisasi sebagai contoh kewenangan Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang sebagian berpindah ke Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan
3. Melakukan rekap capaian indikator persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko pada unit kerja lingkup Ditjen PSDKP di triwulan I tahun 2025

Sebagai kendala terdapat kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan karena kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan nomenklatur organisasi.

ISK 1.1.11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP

Rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan mitra Ditjen PSDKP adalah Inspektorat II KKP, maka walaupun perhitungan kinerja dilakukan triwulanan namun sudah melakukan pemantauan pendahuluan untuk tindak lanjut rekomendasi sebanyak dua kali di bulan Februari dan Maret. Realisasi kinerja indikator dimaksud disajikan pada tabel 3.5

Tabel 3.5 Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP										
	Tahun	Target %	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
			T	R	T	R					
2025	85	85	100	85	-	85	-	85	-	117,64%	
2024	80	80	95	80	99,19	80	90,98	80	100	120%	
2023	75	75	100	75	95,83	75	92,38	75	100	120%	
2022	70	70	46,81	70	95,10	70	96,99	70	99,11	120%	
2021	65	65	89,80	65	93,09	65	95,16	65	89,16	120%	
2020	60	15	37,93	30	62,65	45	61,72	60	74,04	120%	

Dari tabel 3.5 dapat dilihat pada triwulan I terdapat kenaikan yang progresif untuk upaya tindak lanjut hasil rekomendasi meski sempat mengalami penurunan realisasi kinerja pada tahun 2022, namun dapat dikembalikan lagi pada tahun 2023.

Untuk triwulan I tahun 2025, terdapat kendala pada alur komunikasi untuk penyampaian hasil pengawasan oleh APIP. Hasil pengawasan oleh APIP disampaikan langsung ke Satker dan beberapa kali tembusan tidak diterima oleh Setditjen PSDKP, sehingga Setditjen PSDKP harus jemput bola untuk memantau apakah Satker mendapat rekomendasi hasil pengawasan. Disisi lain Satker juga tidak secara reguler menginformasikan hasil pengawasan ke Setditjen PSDKP. Lebih lanjut, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Satker kerap tidak diinformasikan ke Setditjen PSDKP namun langsung disampaikan ke APIP dan lupa tidak diupdate di aplikasi SIDAK.

Sebagai upaya tindak lanjut dilakukan pemantauan dan konsolidasi Setditjen PSDKP dan Satker. Pada saat pemantauan tindak lanjut (PTL) kendala-kendala tersebut diurai dan diselesaikan. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan APIP

untuk lingkup Ditjen PSDKP dan telah ditindaklanjuti sebanyak 22 Laporan Hasil Pengawasan dengan 143 rekomendasi.

ISK 1.1.12 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Selain lingkup Ditjen PSDKP, indikator kinerja yang diampu untuk upaya tindak lanjut hasil rekomendasi APIP yang telah lengkap dan disampaikan kepada APIP adalah di lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP. Realisasi atas indikator kinerja dimaksud disajikan pada tabel 3.6

Tabel 3.6 Realisasi Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan										
	Tahun	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R	
	2025	95	95	100	95	-	95	-	95	-	105,26
	2024	80	80	95	80	100	80	100	80	100	120%
	2023	75	75	100	75	94,59	75	93,62	75	100	120%
	2022	70	70	40,74	70	87,50	70	94,29	70	96,72	120%
	2021	65	65	44,44	65	90,90	65	78,12	65	60,94	120%
	2020	60	15	15	30	83,33	60	66,67	60	83,33	120%

Untuk Sekretariat Ditjen PSDKP terdapat 6 Laporan Hasil Pengawasan dengan 41 rekomendasi. Sebagai kendala yaitu laporan lingkup Ditjen PSDKP menjadi tanggung jawab Sekretariat Ditjen PSDKP, maka dalam rekomendasi kerap ditemukan rekomendasi yang ditujukan kepada Sekretariat Ditjen PSDKP namun secara substansi merupakan rekomendasi untuk Direktorat maupun Satker UPT. Namun disisi lain sebagai nilai tambah Satker, Pimpinan memberikan atensi untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi.

ISK 1.1.13 Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen PSDKP

Laporan Keuangan atas penyelenggaraan program kegiatan yang didukung oleh APBN secara rutin dan berkesinambungan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pemeriksaan laporan keuangan tahun 2024 berdasarkan kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dari target kurang dari 0,5 nilai batas tertinggi temuan atas pemeriksaan laporan keuangan Ditjen PSDKP oleh BPK tahun 2025 sebesar <0,5%. Hingga triwulan I tahun 2025 berakhir, belum ada informasi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2024.

ISK 1.1.14 Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP

Layanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP diantaranya berupa 1) pemberian akses pemantauan kapal perikanan, 2) penerbitan surat keterangan aktivasi transmitter, 3) analisis pergerakan kapal perikanan, 4) penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), 5) penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI) yang dievaluasi setiap triwulan oleh para pengguna jasa melalui survey kepuasan masyarakat dan menjadi indikator kinerja lingkup Ditjen PSDKP baik Pusat di Direktorat POA dan UPT PSDKP. Realisasi indikator kinerja dimaksud lingkup Ditjen PSDKP disajikan pada tabel 3.7

Tabel 3.7 Realisasi nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP										
	Tahun	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R	
	2025	88,5	80	92,24	83	-	86	-	88,5	-	115,3

Pada Sekretariat Ditjen PSDKP mengampu indikator dimaksud di tahun 2025 dan tidak mengampu di tahun anggaran sebelumnya. Nilai survey kepuasan masyarakat di triwulan I tahun 2025 diperoleh dari hasil survey lima belas unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang melayani SLO, Akses pemantauan perikanan, penerbitan surat aktivasi transmitter dan analisis pergerakan kapal perikanan. Untu penerbitan lemr verifikasi hasil penangkapan ikan sudah tidak dilakukan pelayanan karena sudah tidak ada permintaan sehingga per

triwulan I tahun 2025 layanan untuk penerbitan LVHPI. Lebih lanjut, secara ketentuan yang berlaku, Ditjen PSDKP sudah tidak melayani penerbitan LHVPI sejak diterbitkannya Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Hasil survey kepuasan masyarakat di unit kerja lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8 hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025

No	Unit Pelaksana Pelayanan	TW I	Responden	Produk layanan
1	Direktorat POA	95,35	104	1.Pemberian Akses Pemantauan Perikanan 2.Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter 3.Analisis Pergerakan Kapal Perikanan
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	93,70	15	Surat Laik Operasi
3	Pangkalan PSDKP Batam	83,91	97	Surat Laik Operasi
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	95,33	41	Surat Laik Operasi
5	Pangkalan PSDKP Benoa	88,66	122	Surat Laik Operasi
6	Pangkalan PSDKP Bitung	92,65	68	Surat Laik Operasi
7	Pangkalan PSDKP Tual	93,22	43	Surat Laik Operasi
8	Stasiun PSDKP Belawan	83,18	54	Surat Laik Operasi
9	Stasiun PSDKP Cilacap	89,37	69	Surat Laik Operasi
10	Stasiun PSDKP Pontianak	92,55	139	Surat Laik Operasi
11	Stasiun PSDKP Tarakan	90,92	56	Surat Laik Operasi
12	Stasiun PSDKP Tahuna	91,67	15	Surat Laik Operasi
13	Stasiun PSDKP Kupang	97,55	151	Surat Laik Operasi
14	Stasiun PSDKP Ambon	94,82	59	Surat Laik Operasi
15	Stasiun PSDKP Biak	99,38	67	Surat Laik Operasi
Hasil validasi aplikasi SUSAN		92,24	1100	

Dari seluruh hasil survey kepuasan masyarakat, untuk Ditjen PDKP telah divalidasi sebesar 92,24 dengan mutu pelayanan katekor **sangat baik**. Target tahun 2025 sebesar 88,5 dan untuk triwulan I sebesar 80 merespon terhadap kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025.

Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai survey kepuasan masyarakat tertinggi pada Stasiun PSDKP Biak diikuti oleh Stasiun PSKDP Kupang, Direktorat POA, Pangkalan PSKDP Jakarta, dan Stasiun PSKDP Ambon.

ISK 1.1.15 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Layanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP diantaranya berupa 1) pemberian akses pemantauan kapal perikanan, 2) penerbitan surat keterangan aktivasi transmitter, 3) analisis pergerakan kapal perikanan, 4) penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), 5) penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI) yang dievaluasi setiap triwulan oleh para pengguna jasa melalui survey kepuasan masyarakat dan menjadi indikator kinerja lingkup Ditjen PSDKP baik Pusat di Direktorat POA dan UPT PSDKP. Realisasi indikator kinerja dimaksud lingkup Ditjen PSDKP disajikan pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Realisasi nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator kinerja	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Ditjen PSDKP										
	Tahun	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R	
	2025	88,5	80	92,24	83	-	86	-	88,5	-	115,3

Pada Sekretariat Ditjen PSDKP mengampu indikator dimaksud di tahun 2025 dan tidak mengampu di tahun anggaran sebelumnya. Nilai survey kepuasan masyarakat di triwulan I tahun 2025 diperoleh dari hasil survey lima belas unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang melayani SLO, Akses pemantauan perikanan, penerbitan surat aktivasi transmitter dan analisis pergerakan kapal perikanan. Untu penerbitan lembr verifikasi hasil penangkapan ikan sudah tidak dilakukan pelayanan karena sudah tidak ada permintaan sehingga per triwulan I tahun 2025 layanan untuk penerbitan LVHPI. Lebih lanjut, secara ketentuan yang berlaku, Ditjen PSDKP sudah tidak melayani penerbitan LHVPI sejak diterbitkannya Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Untuk nilai kepuasan masyarakat dilihat dari hasil survey setiap unit pelaksanaan pelayanan sesuai tabel 3.10

Tabel 3.10 hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025

No	Unit Pelaksana Pelayanan	TW I	Responden	Produk layanan
1	Direktorat POA	95,35	104	1.Pemberian Akses Pemantauan Perikanan 2.Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter 3.Analisis Pergerakan Kapal Perikanan
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	93,70	15	Surat Laik Operasi
3	Pangkalan PSDKP Batam	83,91	97	Surat Laik Operasi
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	95,33	41	Surat Laik Operasi
5	Pangkalan PSDKP Benoa	88,66	122	Surat Laik Operasi
6	Pangkalan PSDKP Bitung	92,65	68	Surat Laik Operasi
7	Pangkalan PSDKP Tual	93,22	43	Surat Laik Operasi
8	Stasiun PSDKP Belawan	83,18	54	Surat Laik Operasi
9	Stasiun PSDKP Cilacap	89,37	69	Surat Laik Operasi
10	Stasiun PSDKP Pontianak	92,55	139	Surat Laik Operasi
11	Stasiun PSDKP Tarakan	90,92	56	Surat Laik Operasi
12	Stasiun PSDKP Tahuna	91,67	15	Surat Laik Operasi
13	Stasiun PSDKP Kupang	97,55	151	Surat Laik Operasi
14	Stasiun PSDKP Ambon	94,82	59	Surat Laik Operasi
15	Stasiun PSDKP Biak	99,38	67	Surat Laik Operasi
Hasil validasi aplikasi SUSAN		92,24	1100	

ISK 1.1.16 Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP

Dalam pelayanan publik Ditjen PSDKP yang berupa pemberian akses pemantauan kapal perikanan, penerbitan surat keterangan aktivasi transmitter, analisis pergerakan kapal perikanan, penerbitan Surat Laik Operasi, dan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan dievaluasi dengan survey kepuasan masyarakat atas layanan tersebut yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025. Dalam rangka untuk mendapatkan gambaran kepuasan masyarakat dilakukan pengelolaan survey melalui aplikasi SUSAN KKP yang dapat diakses setiap pengguna jasa melalui <https://ptsp.kkp.go.id/skm/p/home>. Pengisian survey dilakukan secara mandiri oleh pengguna jasa layanan. Data hasil survey kemudian dianalisis dan jika terdapat anomali akan ditelusuri untuk penyiapan justifikasi. Data hasil survey dikelola secara terpusat oleh Pusat Data Statistik dan Informasi

KKP setelah mendapat konfirmasi hasil survey dari masing-masing eselon I lingkup KKP, untuk Ditjen PSDKP validasi pengisian survey oleh Unit Pelayanan Publik-Dit POA dan UPT PSDKP, dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP.

ISK 1.1.17 Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Program penyusunan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Hingga triwulan I tahun 2025, untuk lingkup Ditjen PSDKP telah disampaikan 1 usulan Rancangan Kepmen KP tentang RAN IUUF Kedua sebagai tindak lanjut dari Permen KP nomor 93 Tahun 2024 tentang Program PUU KKP tahun 2025. Usulan rancangan Kepmen tersebut saat ini masih dalam proses permintaan masukan kepada eselon 1 lainnya oleh Biro Hukum.

ISK 1.1.18 Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP

Indek Kualitas Kebijakan Pemerintah bidang Penagwasan SDKP menjadi salah satu indikator kinerja di lingkup Ditjen PSDKP untuk memantau besaran dampak kebijakan pada masyarakat kelautdan dan perikanan. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan dalam metadata indikator kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP. Peraturan yang akan diukur dampaknya bagi masyarakat adalah Permen KP Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan.

ISK 1.1.19 Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP

Sebagai tindaklanjut atas tugas fungsi Sekretariat Ditjen PSDKP sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan NSPK menjadi salah satu indikator kinerja di Sekretariat Ditjen PSDKP. Hingga triwulan I tahun 2025 telah ditetapkan NSPK yang bersifat mengatur yaitu 2 Kepdirjen sebagai berikut:

- a. Pedoman pelaksanaan pengumandahan pengawas perikanan dan AKP di Lingkungan DJPSDKP
- b. Juknis pengawasan jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan

ISK 1.1.20 Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Wilayah bebas dari korupsi atau dikenal sebagai WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas nilai 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangannya, dengan persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran. Pada Triwulan I Tahun 2025, Ditjen PSDKP telah melaksanakan pemantauan Pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari usulan penilaian Tim Penilai Nasional (TPN). Terdapat tiga unit kerja yang diusulkan, yaitu Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Pangkalan PSDKP Batam, dan Pangkalan PSDKP Bitung.

Hingga akhir Maret 2025, pemantauan telah dilaksanakan pada dua unit kerja, yaitu Pangkalan PSDKP Batam dan Pangkalan PSDKP Bitung. Sementara itu, pemantauan untuk Direktorat Pengendalian Operasi Armada dijadwalkan terlaksana pada bulan Mei 2025. Saat ini, Ditjen PSDKP masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat V terkait penilaian terhadap Pangkalan Batam dan Bitung.

ISK 1.1.21 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Penilaian mencakup komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil (Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat WBK antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 80 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;

2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.
5. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP

Pada triwulan I tahun 2025, pemantauan telah dilaksanakan pada dua unit kerja, yaitu Pangkalan PSDKP Batam dan Pangkalan PSDKP Bitung, namun hasil resmi belum dirilis oleh Inspektorat V selaku pembina Zona Integritas di lingkungan KKP. Hasil sementara pemantauan awal dapat dilihat pada tabel 3.11

Tabel 3.11 hasil pemantauan awal Inspektorat V untuk evaluasi Zona Integritas

Area Perubahan	Bobot	Nilai	
		UPT Batam	UPT Bitung
A. Pengungkit	60,00		
1. Manajemen Perubahan	8,00	5,90	1.61
2. Penataan Tata Laksana	7,00	3,64	1.56
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10,00	8,07	1.97
4. Penguatan Akuntabilitas	10,00	7,35	6.20
5. Penguatan Pengawasan	15,00	11,35	2.34
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,15	3.43
Total pengungkit		44,46	17,10
B. Hasil	40,00		
I Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5	19,91	2.50
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	17,41	0.00
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	2,50	2.50
II Pelayanan publik yang prima	17,50	17,46	0.00

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	17,46	0.00
Total hasil		37,37	2,50
Nilai Evaluasi Zona Integritas		81,81	19,60

Dari tabel 3.11 dapat dilihat bahwa hasil pemantauan awal UPT PSKDP Batam sebesar 81,81 sedangkan UPT PSDKP Bitung sebesar 19,60. Dengan nilai minimal 75 maka pada pemantauan awal hasil pemantauan pada Pangkalan PSKDP Batam dapat dikatakan lulus sedangkan pada Pangkalan PSKDP Bitung belum lulus. Hasil pemantauan awal tersebut masih ditindaklanjuti dengan pemantauan kedua oleh Inspektorat V KKP yang hasil akhirnya per Maret 2025 belum disampaikan ke Ditjen PSDKP.

ISK 1.1.22 Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja lingkup Setditjen PSDKP

Sudah dilakukan penilaian daftar usulan musnah untuk memulai proses penghapusan arsip inaktif pada Satker Batam, Satker Belawan, Satker Lampulo, Satker Kupang. Usulan disampaikan secara kolektif ke ANRI untuk dapat menerbitkan SK penghapusan arsip inaktif. Lebih lanjut telah dilakukan pemindahan arsip pusat dari tempat kerja ke *record centre*. Disisi lain secara regular sudah dilakukan pemberkasan arsip aktif di aplikasi portal, meski ada kendala pada klasifikasi periode arsip.

Untuk arsip yang dimusnahkan di triwulan I tahun 2025 sebgasai berikut:

1. Pemusnahan Non-Arsip DJPSDKP sebanyak 2 kuintal.
2. Pemusnahan Arsip UPT PSDKP Pontianak pada Februari sebanyak 7.229 berkas.

Sedangkan untuk usulan penghapusan arsip di Stasiun PSDKP Kupang sebanyak 112.354 berkas sudah mendapatkan Surat Persetujuan Pemusnahan dari ANRI, namun masih menunggu SK Pemusnahan dari Biro Umum. Selanjutnya dilakukan Penilaian Daftar Usul Musnah Arsip UPT PSDKP Batam sebanyak 304.974 berkas, UPT PSDKP Belawan sebanyak 2.065 berkas dan UPT PSDKP Lampulo sebanyak 21.092 berkas.

Selanjutnya telah dilakukan pemindahan arsip inaktif ke Gedung Arsip Setditjen PSDKP berdasarkan BA Pemindahan Arsip dari Setditjen PSDKP sebanyak 28 boks, Direktorat PSDK sebanyak 74 boks arsip, dan Direktorat Pengendalian Operasi Armada sebanyak 44 boks arsip serta pemindahan arsip

inaktif dari lantai 14 Gedung Mina Bahari IV untuk Sekretariat Ditjen PSDKP sebanyak sekitar 25 boks arsip yang belum disertakan BA Pemindahan. Penataan Arsip Inaktif Setditjen untuk disusun ke dalam Daftar Usul Musnah sebanyak 76 boks Arsip tahun 2013, dan sedang dilakukan proses penilaian arsip dengan Biro Umum.

Kendala yang dihadapi yaitu pada saat pemindahan arsip masih banyak arsip yang belum diklasifikasikan.

ISK 1.1.23 Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP

Bimtek bidang kesekretariatan dilaksanakan dengan mandatori indikator tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada semester I dan II tahun anggaran.

Berdasarkan rencana kegiatan awal tahun 2025 sedianya pada triwulan I dilaksanakan Bimtek Pengelolaan Kinerja dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024, namun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, maka Bimtek dilaksanakan secara daring dengan penyesuaian pada waktu dan substansi bimtek. Lebih lanjut sebagai penyesuaian agenda untuk menambah kapasitas pemahaman pegawai bidang kesekretariatan, sepanjang triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan NGOBRAS Ngobras (Ngobrol Cerdas Bareng Setditjen PSDKP) yang menghadirkan obrolan santai dan diskusi secara daring seputar kesekretariatan selama 3 jam. Ngobras telah berjalan sebanyak dua edisi dengan tema yaitu:

1. Pengembangan Kompetensi ASN dan Uji Kompetensi
2. Anggaran bicara: perencanaan matang, eksekusi tepat untuk kinerja pengawasan SDKP yang hebat

ISK 1.1.24 Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen PSDKP

Tingkat kelulusan diklat teknis bidang manajerial menjadi salah satu indikator kinerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP untuk mengkuantifikasi keberhasilan upaya meningkatkan kapasitas pegawai terkait bidang kesekretariatan. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada semester I dan semester II tahun anggaran. Hingga triwulan I berakhir belum dilaksanakan diklat teknis lingkup Ditjen PSDKP.

ISK 1.1.25 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP digadang sebagai salah satu indikator kinerja unggulan sebagai upaya adaptasi Ditjen PSDKP terhadap perubahan dan dinamika birokrasi, layanan dan demand masyarakat pada layanan publik yang ditawarkan oleh Ditjen PSDKP. Indikator kinerja ini dihitung capaian kerjanya pada akhir tahun anggaran. Hingga triwulan I tahun 2025 upaya inovasi yang digerakkan adalah menyusun kembali format kegiatan Lomba Inovasi Ditjen PSDKP menyesuaikan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga.

ISK 1.1.26 Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP

Pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP merupakan indikator yang dihitung capaian kerjanya pada akhir tahun anggaran. Hingga triwulan I tahun 2025 tengah disusun ulang format lomba inovasi menyesuaikan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga.

ISK 1.1.27 Nilai implementasi program budaya kerja

Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP merupakan sinkronisasi budaya kerja PILAR PSDKP ke budaya kerja ASN BerAKHLAK. Indikator kinerja ini dihitung capaian kerjanya pada akhir tahun anggaran. Sebagai implementasi program budaya kerja di lingkup Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2025, telah dilakukan penilaian Budaya Kerja untuk tahun 2024 serta evaluasi pelaksanaan program budaya kerja tahun 2024. Kendala impelmenetasi budaya kerja adalah adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan budaya kerja tidak dapat dilaksanakan.

ISK 1.1.28 Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyampaian keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan melalui media *online* maupun *offline*. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keterbukaan pelayanan informasi publik Ditjen PSDKP adalah:

1. Menyediakan layanan keterbukaan informasi publik
2. Membuat SK Tim PPID dengan melibatkan seluruh UPT PSDKP

3. Menindaklanjuti informasi masyarakat
4. Memetakan SK daftar informasi yang bisa dipublikasikan dan yang dikecualikan dan hingga triwulan I berakhir masih proses legal drafting

Dalam melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi public, ditemukan kendala pada media layanan whatsapp business yang sejak Maret 2025 tidak lagi efektif sebagai dampak efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.

ISK 1.1.29 Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP

Ditjen PSDKP dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memanfaatkan data pengawasan yang dikelola secara komprehensif, mulai dari perolehan data secara manual untuk kemudian diolah secara menyeluruh dengan sistem informasi pengawasan, menghasilkan beragam output diantaranya data keragaan pengawasan SDKP, PSDKP dalam angka, sistem informasi pengawasan dan sistem informasi perkantoran modern. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya di akhir tahun anggaran.

Setiap output tersebut merupakan pengelolaan data yang berkesinambungan antara data keragaan PSDKP dan PSDKP dalam angka serta pengelolaan berkesinambungan antara sistem informasi pengawasan dan sistem informasi perkantoran modern, yang seluruhnya dimulai dari perencanaan data yang dibutuhkan/dikelola, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian data. Khusus untuk sistem informasi terdapat aspek perancangan/pembangunan sistem data dan kebermanfaatan pada unit kerja melaksanakan tugas pengawasan SDKP. Pada periode triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan pengelolaan data dan informasi dengan indeks 60.

ISK 1.1.30 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP

Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Aplikasi SIRUP) Ditjen PSDKP dan merupakan upaya optimalisasi kinerja perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) Triwulan I Tahun 2025. Langkah ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengadaan yang berdampak efisiensi belanja anggaran serta memastikan bahwa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan tidak diumumkan pada Aplikasi SIRUP. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga belum ada sandingan capaian kinerja.

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Realisasi indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.12

Tabel 3.12 realisasi persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP Triwulan I tahun 2025

Indikator kinerja	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP Tahun 2025					Capaian
	Tahun	Target	Realisasi			
TW I			TW II	TW III	TW IV	
2025	76	99,93%	-	-	-	120%

Hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase RUP di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang diumumkan pada Aplikasi SIRUP Triwulan 1 Tahun anggaran 2025 adalah 99,93%. Dari 15 Satuan Kerja terdapat Satu Satuan Kerja yang tidak tepat 100% dalam melaksanakan pengumuman pengadaan yaitu Pangkalan PSDKP Bitung dengan persentase 101,52%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kertas kerja (dalam format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca kebijakan efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
2. Melakukan revisi RUP pada Aplikasi SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun;
3. Revisi RUP yang dilakukan Satuan Kerja pada Aplikasi SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Monev Aplikasi SIRUP.

Adapun kendala yang dialami dalam perhitungan persentase RUP yang diumumkan pada Aplikasi SIRUP, meliputi:

1. Proses revisi RUP harus dilakukan pada tiap-tiap akun belanja sehingga membutuhkan waktu yang lama;
2. Statistik Monev pada Aplikasi SIRUP tidak lagi dapat dijadikan acuan utama untuk memastikan pengumuman pengadaan mencapai 100%, karena mulai tahun ini dilakukan penertiban terhadap akun-akun belanja yang bersifat keuangan dan bukan termasuk pengadaan barang/jasa,

seperti perjalanan dinas dan honorarium. Hal ini menyulitkan proses pemantauan dan verifikasi data pengadaan;

3. Tingginya beban kerja menyebabkan kelalaian SDM, sehingga diperlukan strategi pembagian tugas yang lebih efektif guna menghindari kesalahan dan mempercepat proses revisi RUP;
4. Untuk Aplikasi SIRUP Sekretariat Ditjen PSDKP yang menganut 1 (Satu) DIPA, perlu dilakukan pembagian berdasarkan unit eselon II. Sedangkan Aplikasi SIRUP belum mendukung pembagian pengadaan yang terumumkan sehingga menyulitkan proses revisi.

ISK 1.2.1 Persentase implementasi kerja sama luar negeri

Implementasi kerjasama luar negeri adalah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan melibatkan dua belah pihak atau lebih mitra luar negeri untuk mencapai tujuan bersama khususnya dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP. Bentuk kerjasama dapat berupa pertemuan bilateral, pertemuan regional/multilateral, workshop/FGD/seminar yang dilaksanakan sebagai hasil kerjasama luar negeri. Ditjen PSDKP menjalin kerjasama dengan organisasi dan negara lain untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia khususnya Ditjen PSDKP aktif menangani permasalahan di wilayah regional dan internasional khususnya yang terkait konflik wilayah perbatasan, pemberantasan IUUF, capacity building baik pegawai maupun Masyarakat serta peningkatan penyadartahuan masyarakat. indikator ini dihitung capaian kerjanya pada akhir tahun anggaran.

Hingga akhir Triwulan I 2025 kinerja implementasi kerjasama luar negeri sebagai berikut:

1. Koordinasi rutin dan pembahasan rencana aksi antara Direktorat Jenderal PSDKP dengan *Australian Border Forces (ABF)* dalam kerangka *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum*, diantaranya adalah (i) pembahasan rencana pelaksanaan Patroli Terkoordinasi GANNET Ausindo 2025, (ii) pembahasan rencana pelaksanaan pertemuan senior tahunan IAFSF 2025 di Jakarta, (iv) pembahasan rencana pelaksanaan *Public Information Campaign 2025*, (v) partisipasi perwakilan Ditjen. PSDKP pada kegiatan peningkatan kapasitas yang difasilitasi oleh ABF, serta (vi) pertukaran data informasi reguler tentang nelayan yang diduga melakukan kegiatan melintas batas perairan Australia.
2. Partisipasi delegasi Ditjen. PSDKP pada forum internasional terkait substansi *IUU Fishing* diantaranya:

- a. Pertemuan Tim Teknis Batas Maritim untuk membahas *Implementing Arrangement Area Tumpang Tindih Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI – Vietnam* pada bulan Januari 2025 di Vietnam.
- b. *Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) Inbound* pada bulan Februari 2025 di Jepang yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang sektor keselamatan maritim dan perikanan Jepang.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian jadwal koordinasi antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan mundurnya waktu pelaksanaan beberapa kegiatan. Selain itu, tingkat keaktifan mitra kerja sama juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran implementasi rencana aksi.

Sebagai upaya tindak lanjut, telah dilakukan langkah-langkah strategis, antara lain dengan lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan mitra kerja sama serta mencari alternatif atau pendekatan komunikasi yang lebih relevan dan efektif untuk mengatasi hambatan yang ada.

Sebagai bagian dari rencana kerja Triwulan berikutnya, direncanakan untuk melaksanakan kegiatan berikut:

1. Pertemuan Senior IAFSF 2025 yang akan diselenggarakan di Indonesia.
2. Pelatihan Regional untuk Maritim Sipil, melanjutkan program yang telah berjalan sebelumnya.
3. Pertukaran Data Nelayan Pelintas Batas, guna memperkuat implementasi kebijakan yang telah dirintis di tahun sebelumnya.
4. Pelaksanaan Patroli Terkoordinasi Ausindo 2025.

Dengan pelaksanaan rencana kerja yang lebih matang serta koordinasi yang semakin intensif, diharapkan capaian kinerja kerja sama luar negeri pada periode berikutnya dapat terus meningkat secara signifikan.

ISK 1.2.2 Persentase dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani

Selain kerjasama internasional, Ditjen PSDKP juga menjalin kerjasama dalam negeri dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan lembaga non pemerintah untuk mendukung kinerja pengawasan SDKP. Ruang lingkup kerjasama dalam negeri adalah Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama,

Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan dan rencana aksi kerjasama. Indikator kinerja ini juga dihitung caaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

Keberhasilan pelaksanaan kerja sama dalam negeri didukung oleh tercapainya penandatanganan dokumen penting, seperti keaktifan dalam menyusun dokumen kerja sama yang selaras dengan kebutuhan kedua belah pihak menjadi faktor utama keberhasilan. Namun demikian terdapat kendala pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama tidak dilakukan secara reguler, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas implementasi kerja sama. Untuk pelaporan implementasi kerja sama masih kurang aktif, sehingga sulit untuk memantau keberlanjutan dan dampak kerja sama.

Sebagai upaya perbaikan direkomendasikan untuk dapat melakukan upaya:

1. Monitoring dan evaluasi secara reguler terhadap pelaksanaan kerja sama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
2. Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan implementasi kerja sama.
3. Lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan mitra kerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan serta mempercepat penyelesaian dokumen kerja sama.

Pelaksanaan kerja sama, seperti penandatanganan dokumen dengan mitra kerja strategis (universitas dan pemerintah daerah), menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran. Namun, keterbatasan dalam monitoring dan evaluasi reguler mengindikasikan adanya potensi inefisiensi dalam pengelolaan kerja sama yang sudah berjalan.

Kegiatan yang dilakukan sepanjang triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Ditjen. PSDKP antara PT Bank Mandiri tentang Layanan Mandiri Payroll serta tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan.
2. Analisis dan perpanjangan perjanjian kerja sama yang akan berakhir pada awal tahun 2025.

ISK 1.2.3 Indeks efektifitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU

RPOA IUU sebagai inisiatif regional disepakati tahun 2007 di Bali oleh 11 negara antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Viet Nam, untuk mempromosikan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab termasuk mendorong penguatan pemberantasan IUU fishing. Indonesia

sebagai Sekretariat RPOA-IUUF sejak tahun 2009 sampai saat ini, dengan ruang lingkup kegiatan memfasilitasi pelaksanaan Annual Workplan yang melibatkan negara-negara peserta RPOA-IUU diantaranya adalah pertemuan *Coordination Committee Meeting (CCM)*, pertemuan *Consultative Meeting (CM)*, adopsi dokumen oleh negara peserta dan Workshop/FGD/Pelatihan/Seminar yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama RPOA-IUU. Komponen yang digunakan untuk mendapat Gambaran kinerja Sekretariat RPOA-IUUF adalah layanan Sekretariat, pelaksanaan tahapan kegiatan annual workplan dan pelaksanaan tahapan adopsi dokumen. Indikator ini dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

Sepanjang periode Triwulan I Tahun 2025 kinerja layanan kesekretariatan dan rencana kerja tahunan Sekretariat diantaranya:

1. Menyusun dan merancang bahan publikasi RPOA-IUU yang meliputi *newsletter, social media content, dan website* untuk edisi kuartal 1 tahun 2025;
2. Memformulasikan proposal dan rencana kegiatan untuk pendanaan dari Pemerintah Kanada terkait dengan pelatihan teknis untuk penguatan *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS)*;
3. Menjalin komunikasi dengan Pemerintah Australia mengenai tindak lanjut dari proposal yang diajukan oleh Sekretariat RPOA-IUU;
4. Mengembangkan dan merancang *concept note* terkait dengan *decent working condition on fishing vessels and fishing industry* dilanjutkan berkorespondensi dengan International Labour Organization (ILO);
5. Memfasilitasi negara partisipan RPOA-IUU dalam penyelenggaraan Fisheries MCS Training Course, Fisheries Officer Exchange serta menyusun dokumen-dokumen pendukung;
6. Memperbaharui *RPOA-IUU Watch List* yang sudah diintegrasikan oleh informasi dari *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*;
7. Memperbaharui *MCS Key Instrument Lists* sebagai sarana pertukaran data dan informasi terkait progress negara dalam mengimplementasikan instrumen regional dan internasional.

Sebagai rencana kegiatan pada periode selanjutnya diantaranya sebagai berikut:

1. Melanjutkan penyusunan *RPOA-IUU Newsletter* berbasis kuartal dengan bekerjasama dengan RPOA-IUU partners.
2. Mengoptimalkan *RPOA-IUU Website* dan *RPOA-IUU Knowledge Management Platform*

3. Menyelenggarakan *consultative meeting* untuk membahas *evaluation and reporting tools* dan *data-sharing mechanism*;
4. Bekerjasama dengan *Australian Government* dalam mempromosikan program SEA-IUU fishing serta memfasilitasi negara partisipan RPOA-IUU dalam kegiatan program tersebut di tahun 2025;
5. Menyelenggarakan beberapa forum regional yang fokus pada implementasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan pemberantasan *IUU fishing*.

Program-program tersebut tidak hanya mendukung upaya pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kolaborasi antar negara anggota sebagai tindak lanjut, Sekretariat merencanakan beberapa program prioritas untuk periode mendatang, antara lain:

1. *Regional MCS Training Course 2025*
2. *Fisheries Officer Exchange 2025*
3. *RPOA-IUU Consultative Meeting*
4. *Regional Workshops*
5. *RPOA-IUU Coordination Committee Meeting ke-18*
6. *Partners Coordination Meeting*

Rencana ini diharapkan dapat lebih mempererat kerja sama regional, meningkatkan kapasitas negara anggota, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan koordinasi dalam rangka pemberantasan IUU fishing di kawasan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh negara anggota, didukung oleh program kerja yang terarah dan kolaborasi yang sinergis, Sekretariat RPOA-IUUF optimis dapat terus mencapai kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

C. EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, sepanjang triulan I tahun 2025 telah dilakukan upaya efisiensi sebagai tindak lanjut arahan presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Anggaran pada Sekretariat Ditjen PSDKP di awal tahun anggaran 2025 telah mengalami efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan belanja operasional perkantoran. Sebagai rasionalisasi efisiensi anggaran maka diimplementasikan kebijakan *work from anywhere* di lingkup KKP yang juga diimplementasikan di lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sekretariat Ditjen PSDKP melaksanakan dprogram dukungan manajemen untuk mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan dukungan anggaran di awal tahun 2025 sebesar Rp837.122.147.000,00 dengan realisasi hingga triwulan I sebesar Rp38.107.932.756,00. Rincian realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP pada trowulan I tahun 2025 sebagai mana tertera pada tabel 3.13

Tabel 3.13 Realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP program Dukungan Manajemen triwulan I tahun 2025

APBN Perubahan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	59.012.285.000	263.770.193.000	4.339.669.000	327.122.147.000
Realisasi	15.421.060.903	22.645.231.913	41.639.940	38.107.932.756
Besaran realisasi	26,13%	8,59%	0,96%	11,65%

Selain pagu dan realisasi tertera pada tabel 3.13, Sekretariat Ditjen PSDKP juga mendapatkan alokasi pagu PNBPN sebesar Rp68.428.441.000,00 namun demikian untuk dapat memanfaatkan PNBPN, target penerimaan perijinan kapal perikanan pada Ditjen Perikanan tangkap harus dapat terpenuhi terlebih dahulu.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Atas hasil penghitungan dan analisis capaian kinerja triwulan I tahun 2025 Sekretariat Ditjen PSDKP dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai kinerja organisasi Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2024 sebesar 108,85% dari kontribusi tiga puluh tiga indikator sasaran kegiatan yang dihitung capaian kinerjanya dari dua sasaran kegiatan.
2. Dari ketiga puluh tiga indikator sasaran kegiatan tersebut, terdapat enam indikator kegiatan yang dihitung capaian kinerjanya pada triwulan I tahun 2025, yaitu 1) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP, 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP, 3) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, 4) Nilai survey kepuasan masyarakat Ditjen PSDKP, 5) Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP, dan 6) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP.
3. Dari keenam indikator tersebut, terdapat tiga indikator dengan capaian kinerja istimewa dengan persentase capaian kinerja diatas 110%.
4. Ditengah kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, pagu APBN Sekretariat Ditjen PSDKP sebesar Rp327.122.147.000,00 telah terealisasi untuk mendukung kegiatan kesekretariatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp38.107.932.756,00 (persentase 11,65%), capaian ini selaras dengan Rencana Penarikan Dana anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP dengan didominasi gaji dan tunjangan pegawai ASN, PPPK dan PJLP.

B. SARAN

Berdasarkan hasil monitoring atas capaian kinerja interim triwulan I tahun 2025, secara umum tidak terdapat kendala berarti yang menghambat kinerja Sekretariat Ditjen PSDKP, namun demikian direkomendasikan untuk tetap memantau kinerja sebelum berakhir triwulan II tahun 2025 karena terdapat beberapa indikator lain yang dihitung capaian kinerjanya pada triwulan II tahun 2025.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharta

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

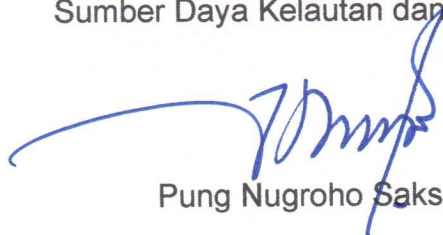
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

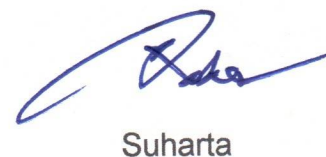
Jakarta, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP



Suharta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	71,5
	2. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran	100%
	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92
	4. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA (%)	100
	5. Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77
	6. Persentase penyerapan anggaran Ditjen PSDKP	95%
	7. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81
	8. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88
	9. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,35
	10. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%
	11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	85%
	12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
	13. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5
	14. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP	88,5
	15. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,5
	16. Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	100%
	17. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%
	18. Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70
	19. Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	100%
	20. Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK	16
	21. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	80

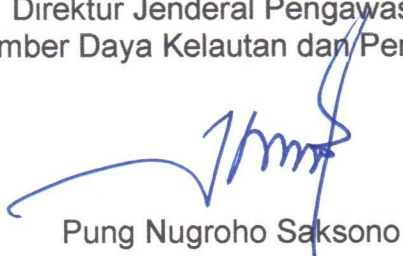
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP (nilai)	80
		23. Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP	78
		24. Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP	83
		25. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	1
		26. Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP (%)	100%
		27. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70
		28. Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	60
		29. Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP	80
		30. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	76
2.	Terselenggaranya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif	31. Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri	80%
		32. Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani	80%
		33. Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	114.096.426.000
Total Anggaran Sekretariat Ditjen PSDKP Tahun 2025		114.096.426.000


Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP



Suharta



SEKRETARIAT DITJEN PSDKP
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN